

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu upaya yang dilakukan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keberadaan sumberdaya manusia yang berkualitas dapat mendorong pembangunan ekonomi di suatu negara (Siregar, 2017). Pengendalian jumlah dan mutu sumberdaya adalah hal terpenting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pemerataan persebaran sumberdaya manusia.

Di sisi lain, gencarnya pembangunan yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah memicu terjadinya mobilisasi penduduk desa – kota. Kondisi tersebut mencerminkan adanya hubungan timbal balik antara pembangunan dan kependudukan (Bandiyono, 2008). Keberadaan migran dalam pandangan historis struktural muncul akibat kebijakan pembangunan yang berfokus pada kota, mengejar pertumbuhan, dan mengorbankan pemerataan (Rijanta, 2003).

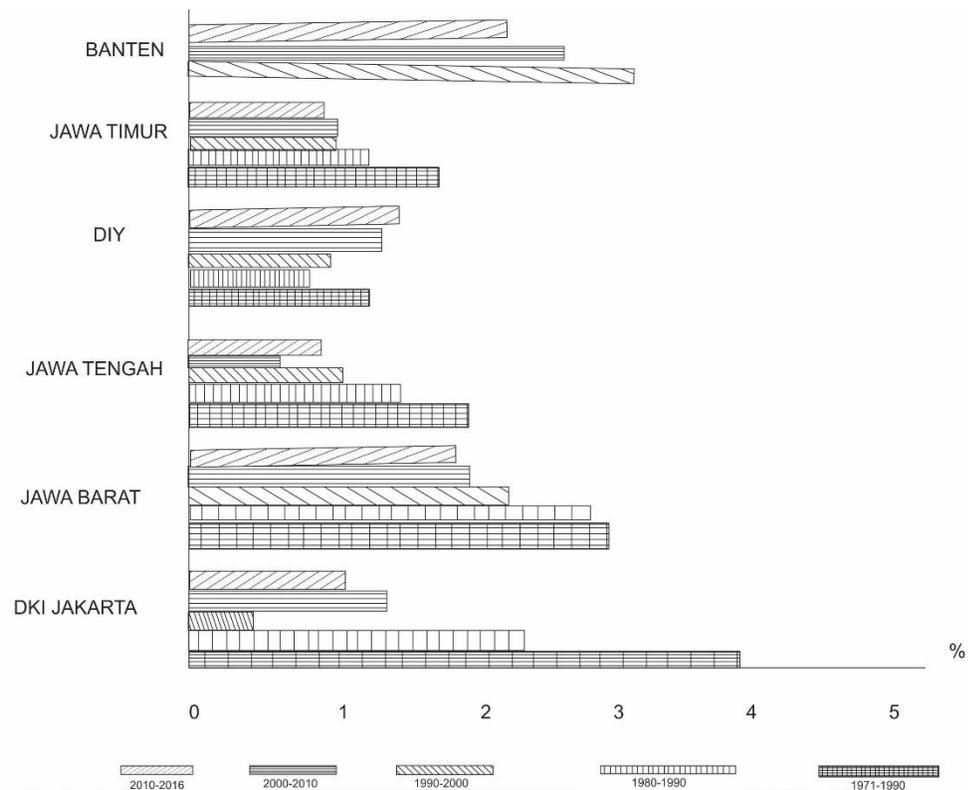
Migrasi menjadi masalah baru di balik pembangunan ekonomi yang dilakukan pemerintah. Faktor pendorong terjadinya migrasi, salah satunya pendapatan dari sektor pertanian belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga mendorong terjadinya migrasi dengan motif mencari pendapatan yang lebih baik (Syafa'at, 2016).

Faktor penarik daerah tujuan migrasi akibat adanya bias perkotaan dalam strategi pembangunan (Todaro & Smith. 2011 : 390). Bias perkotaan diartikan sebagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam pembangunan yang terkonsentrasi pada

perkotaan. Akibatnya daerah yang menjadi pusat pembangunan memiliki daya tarik untuk dijadikan daerah tujuan migrasi.

Daerah yang menanggung bias perkotaan diuntungkan dengan menerima investasi pemerintah dan swasta lebih banyak dari kota lainnya. Dampak positif yang didapatkan daerah tersebut menjadi pusat aktivitas ekonomi, disisi lain menanggung jumlah penduduk yang tinggi akibat daya tarik yang dimilikinya (Todaro & Smith. 2011 : 400). Di Indonesia, daerah yang dijadikan pusat kota adalah kota-kota yang berada di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan kedekatan dengan pusat pemerintahan, serta ketidakmampuan menciptakan kota baru akibat kegagalan dalam upaya pembangunan.

Daerah-daerah di pulau Jawa yang mengalami bias perkotaan memiliki laju pertumbuhan yang tinggi dibandingkan daerah di luar pulau Jawa. Laju pertumbuhan penduduk secara kuantitatif diukur sebagai presentase pertambahan maupun pengurangan dari jumlah penduduk pertahun karena pertambahan alamiah (*natural increase*) dan migrasi (Todaro & Smith,2011 : 340). Laju pertumbuhan penduduk di pulau Jawa dapat disajikan pada gambar berikut.



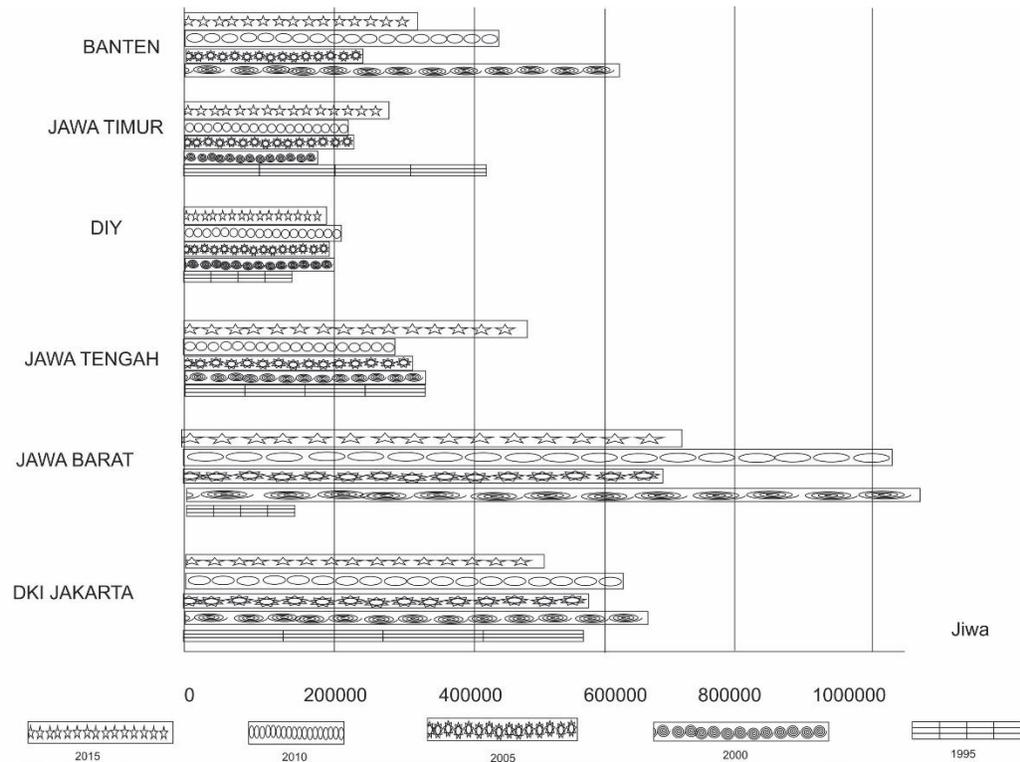
Sumber : Badan Pusat Statistika

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan Penduduk di Pulau Jawa

Provinsi yang memiliki tingkat laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat. Periode 1971 – 1980 laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 3,93%. Selanjutnya, Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat selalu berada di posisi laju pertumbuhan tertinggi. Provinsi Banten merupakan pemekaran dari Provinsi Jawa Barat setelah dikeluarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2000 sehingga hasil sensus yang dikeluarkan dimulai tahun 2000.

Laju pertumbuhan di pulau Jawa disebabkan oleh pertambahan alamiah serta migrasi. Dari data Laju penduduk, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten memiliki peningkatan laju penduduk setiap periodenya. Dilihat dari komponen angka kelahiran dan angka kematian, kedua provinsi tersebut mampu mengendalikannya. Artinya, ada komponen lain yang menyumbang laju pertumbuhan selain angka kelahiran dan angka kematian sehingga untuk mengurai permasalahan laju penduduk perlu dilihat dari tingkat migrasi.

Migrasi di negara berkembang seperti di Indonesia, merupakan topik yang penting untuk dikaji, karena kepadatan pada suatu daerah mencerminkan distribusi pendapatan yang tidak merata (Junaidi&Hardiani, 2009). Penganalisaan arus migrasi selain dilihat dari data migrasi seumur hidup, juga dapat dilihat dari data migrasi risen (*recent migration*). Badan Pusat Statistika (BPS) mengategorikan seseorang tergolong ke dalam migrasi risen jika tempat tinggal yang ditempati lima tahun lalu, berbeda dengan tempat tinggal yang ditempati sekarang. Arus migrasi di pulau Jawa berdasarkan migrasi risen masuk disajikan pada gambar berikut.

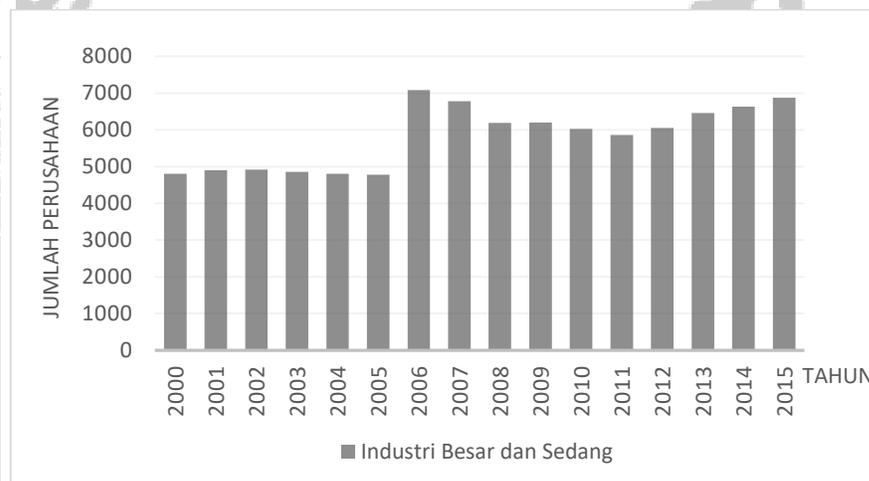


Sumber : Badan Pusat Statistika

Gambar 1.2 Migrasi Risen Masuk ke Pulau Jawa

Jumlah migrasi risen masuk ke Provinsi Jawa Barat lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa. Meskipun pada tahun 1995 migrasi risen masuk tertinggi diduduki oleh provinsi DKI Jakarta, sejak tahun 2000 – 2015 Provinsi Jawa Barat menduduki posisi tertinggi. Artinya ada faktor penarik yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat sehingga diminati untuk dijadikan daerah tujuan migrasi. Umumnya migrasi dilakukan dengan latar belakang memperbaiki taraf hidup. Suatu daerah dapat dijadikan tujuan migrasi diakibatkan memiliki kelebihan baik dari segi ekonomi maupun non ekonomi.

Faktor penarik Provinsi Jawa Barat dapat disebabkan keberadaan jumlah industri besar dan sedang yang mengalami peningkatan sejak tahun 2006 - 2015. Industri menjadi daya tarik bagi para migran karena berkaitan dengan probabilitas mendapatkan kesempatan kerja. Perkembangan industri besar dan sedang di Jawa Barat terlihat dalam gambar berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistika Jawa Barat

Gambar 1.3
Industri Besar dan Sedang Provinsi Jawa Barat

Kurniawahyudi (2007) meneliti pengaruh faktor-faktor ekonomi terhadap tingkat migrasi ke Provinsi DKI Jakarta. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap tingkat migrasi masuk ke Provinsi DKI Jakarta. Begitupula dengan tingkat UMR, Jika UMR di daerah asal mengalami peningkatan maka akan menurunkan jumlah migrasi ke Provinsi DKI Jakarta. Artinya jika daerah asal dapat memberikan jaminan ekonomi yang lebih baik maka tingkat migrasi dapat berkurang.

Dari penelitian tersebut, dalam skripsi ini peneliti memilih Provinsi Jawa Barat sebagai objek penelitian. Hal tersebut disebabkan Provinsi Jawa Barat mulai dijadikan daerah tujuan sejak tahun 2000. Dalam penelitian kali ini selain membahas faktor ekonomi berupa PDRB, UMR dan jumlah industri, serta peneliti menghadirkan faktor non ekonomi berupa ketersediaan fasilitas pendidikan. Sehingga penelitian ini akan membahas **“Determinan Migrasi Risen Masuk Ke Provinsi Jawa Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian yang penulis lakukan adalah untuk menganalisis faktor ekonomi yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum Regional (UMR), dan Jumlah Industri. Selain itu peneliti juga menambahkan faktor non ekonomi yakni ketersediaan fasilitas pendidikan berupa jumlah sekolah. Faktor ekonomi dan faktor non ekonomi tersebut akan dianalisis terhadap migrasi masuk ke Provinsi Jawa Barat. Berikut rumusan masalah dalam penelitian kali ini :

1. Apakah terdapat pengaruh PDRB terhadap tingkat migrasi masuk ke Provinsi Jawa Barat?
2. Apakah terdapat pengaruh UMR terhadap tingkat migrasi masuk ke Provinsi Jawa Barat?
3. Apakah terdapat pengaruh jumlah industry terhadap tingkat migrasi masuk ke Provinsi Jawa Barat?
4. Apakah terdapat pengaruh jumlah perguruan tinggi terhadap tingkat migrasi masuk ke Provinsi Jawa Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap tingkat migrasi masuk ke Provinsi Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh UMR terhadap tingkat migrasi masuk ke Provinsi Jawa Barat
3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah industry terhadap tingkat migrasi masuk ke Provinsi Jawa Barat
4. Untuk menganalisis pengaruh jumlah perguruan tinggi terhadap tingkat migrasi masuk ke Provinsi Jawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti sendiri untuk menambah wawasan serta mengimplementasikan materi yang telah dipelajari selama berkuliah di Universitas Islam Indonesia. Selain itu diharapkan dapat bermanfaat bagi akademik sebagai sumbangan wawasan bagi para ekonom.
2. Bagi instansi pemerintah terkait agar dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan mengentaskan permasalahan migrasi.

1.5 Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian disusun dengan sistematika penelitian yang terdiri dari lima bab, yakni sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Mengemukakan kajian pustaka, landasan teori, hipotesis penelitian yang digunakan, serta menggambarkan kerangka konseptual penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan jenis dan sumber data, variabel – variabel yang diteliti, perumusan model penelitian, dan metode penelitian yang digunakan.

BAB IV : HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Mengemukakan hasil penelitian spasial berupa pemetaan dan hasil analisis data statistik serta pembahasannya.

BAB V : KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Memuat simpulan dari penelitian serta implikasi kebijakan